



**KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

2024

**PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 900.1.1 / 4342 / TAPD
900.1.1 / 248 / DPRD-B
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : dr. HARISSON, M.Kes.
Jabatan : Penjabat Gubernur Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. a. Nama : M. KEBING L
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- b. Nama : Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- c. Nama : H. SYARIF AMIN MUHAMMAD, S.Ak
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- d. Nama : YULIANA, S.M
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, 26 September 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

selaku,
PIHAK PERTAMA



dr. HARISSON, M.Kes



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

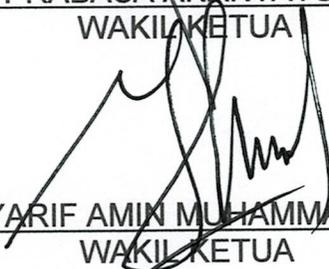
Selaku
PIHAK KEDUA



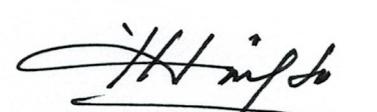
M. KEBING L.
KETUA



Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
WAKIL KETUA



H. SYARIF AMIN MUHAMMAD, S.Ak
WAKIL KETUA



YULIANA, S.M
WAKIL KETUA



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai amanat ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan di dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedua Undang Undang tersebut sama-sama mengamanatkan adanya jaminan terhadap konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penganggaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

KUA dan RKPD tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi – asumsi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan, kebijakan belanja serta kebijakan pembiayaan daerah.

I.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Memproyeksikan perkembangan asumsi ekonomi makro
3. Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

I.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

KUA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026
19. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Kerangka ekonomi makro daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2024 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Kalimantan Barat tahun 2024. Kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Barat merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 - 2026 melalui program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kalimantan Barat, terutama pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2022 yang menjadi momentum pertumbuhan ekonomi, proyeksi tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2024. Asumsi ekonomi makro dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengacu pada asumsi ekonomi makro Indonesia dan juga memperhatikan asumsi lain yang dianggap berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tingkat inflasi diasumsikan stabil pada rentang sasaran 1,5 – 3,5 persen. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika terjadi kenaikan tingkat harga secara umum atau dengan kata lain tingkat inflasi tinggi maka akan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi inflasi, maka akan menggerus daya beli masyarakat.

Pergerakan nilai tukar rupiah mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi serta inflasi daerah. Posisi nilai tukar terhadap dolar sampai dengan akhir tahun 2022 berkisar Rp.14.357,00 sampai dengan Rp.15.657 per dolar AS. Nilai tukar rupiah sampai dengan Maret tahun 2023 masih bertahap dilevel Rp. 15.600,00 per dolar AS tentunya berpengaruh pada nilai ekspor Kalimantan Barat, namun

hal ini dapat berimbang pula dengan kenaikan harga-harga komoditas di pasar internasional.

Tabel 2.1
Asumsi Makro Ekonomi Nasional

Asumsi*	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	5,1 – 5,7
	Inflasi Nasional (%)	1,5 – 3,5
	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.700 – 15.200

Keterangan: *= Asumsi dasar RAPBN 2024 Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024

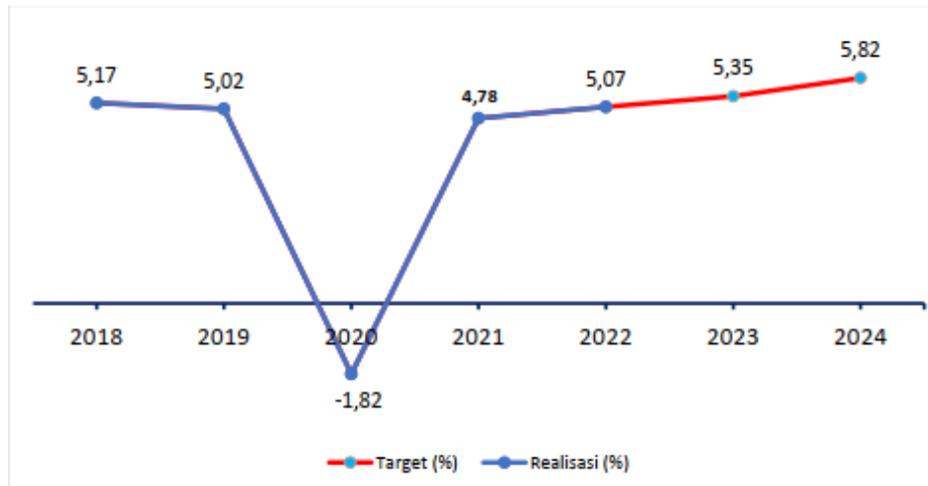
Perkiraan kondisi ekonomi Kalimantan Barat tahun 2023 lebih baik dibanding 2022, dengan asumsi inflasi tetap terkendali dan menggeliatnya sektor produksi berorientasi ekspor. Konsumsi rumah tangga berkontribusi berada diatas 50% pada total PDRB Kalbar dengan pertumbuhan sebesar 2,10 - 2,42% di tahun 2023. Artinya konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dari sisi pengeluaran sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalimantan Barat dibanding komponen pengeluaran PDRB lainnya. Keadaan ini bisa sama atau diatas di tahun 2022 dengan pertimbangan inflasi tetap terkendali pada level rendah dan stabil yaitu 1,5% - 3,5%. Investasi menjadi prasyarat penting untuk mencapai percepatan pertumbuhan, mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang kembali ke pertumbuhan normal sebelum pandemi covid-19 (5,07 persen). Sehingga apabila ada tambahan investasi yang masuk ke Kalbar tahun 2023 secara langsung akan menambah nilai PDRB dan ekonomi bisa tumbuh kembali. Paling tidak ada 8 - 14 trilyun investasi baru yang masuk ke Kalbar agar dapat pencapaian pertumbuhan ekonomi 5%. Dunia usaha mulai kembali memproduksi pada skala normal; hal ini tentunya tidaklah mudah, namun secara lambat tapi pasti, sektor-sektor ekonomi yang terdampak covid-19 mulai bangkit lagi seiring terciptanya rasa aman dengan adanya vaksin dan juga sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Dari sisi ekspor impor dengan memanfaatkan sebesar-besarnya pintu gerbang ekspor Kalbar yaitu beroperasinya Pelabuhan Kijing dan di 3 PLBN yang

ada (Aruk, Entikong dan Badau), berpeluang memperbesar kapasitas berbagai produk ekspor ke pasar dunia seiring naiknya harga komoditas di pasar global.

Gambar 2.1

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 2023-2024



Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat tahun 2023 telah diproyeksikan didalam Perubahan RPJMD 2018 – 2023 dengan target capaian 5,05 persen hingga 5,68 persen, dan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di proyeksi dalam RPD tahun 2024 – 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 merupakan skala moderat dengan optimisme untuk tercapai dengan peningkatan ekspor, potensi investasi yang tinggi, naiknya daya beli masyarakat dan peningkatan produksi sektor-sektor unggulan, dan tentunya dengan inflasi terjaga dalam kisaran 1,5 – 3,5 persen. Selain itu perhitungan target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2024 juga didasarkan atas asumsi tambahan lainnya yang dominan pada sektor lapangan usaha, dalam hal ini harga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Sawit (TBS) dikarenakan menyumbangkan rata-rata 40 persen dari total sektor Pertanian dalam PDRB Lapangan Usaha.

Tabel 2.2
Asumsi Ekonomi Makro Kalimantan Barat Tahun 2024

Indikator	RKPD 2024
*Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,82
*Inflasi (%)	1,5 – 3,5
*Nilai Tukar (Rp/USD)	14.700 – 15.200
**Crude Palm Oil (CPO) (USD/Ton)	850 – 1.200
**Tandan Buah Sawit (TBS) (Rp/Kg)	1.500 – 3.500

Sumber: *RKPD Prov. Kalimantan Barat 2024

**Asumsi Tambahan Lainnya

Struktur perekonomian Kalimantan Barat dari PDRB sisi Pengeluaran masih tergantung pada sektor primer, yang dalam hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan sektor pertambangan dan sektor pertanian di tahun 2022. Pada pertambangan seperti bouksit dan alumina, serta perkebunan sawit cukup mendominasi dalam devisa ekspor, membuat perekonomian Kalimantan Barat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.

Tabel 2.3
Realisasi tahun 2021 – 2022 dan Target Pertumbuhan Ekonomi
Kalimantan Barat tahun 2023 - 2024 dari Sisi lapangan Usaha (Sektoral)

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Realisasi (%)		Target	
	2021	2022	RPJMD	RPD
			2023	2024
Pertumbuhan PDRB	4,78	5,07	5,02 - 5,68	5,82
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,14	2,18	5,71 - 6,44	3,82
Pertambangan dan Penggalian	2,25	2,43	4,43 - 5,07	9,92
Industri Pengolahan	5,23	4,04	7,81 - 7,83	4,85
Pengadaan Listrik dan Gas	1,13	4,34	3,3 - 3,86	4,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	6,65	3,8 - 4,06	6,67
Konstruksi	8,16	0,82	1,96 - 2,35	6,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,16	12,48	4,51 - 5,99	4,93
Transportasi dan Pergudangan	-7,29	24,1	2,75 - 3,71	5,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,72	10,57	3,41 - 4,73	8,94
Informasi dan Komunikasi	6,54	7,7	8,26 - 8,71	8,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	0,94	1,77 - 3,1	5,50
Real Estate	3,44	0,53	0,55 - 0,96	4,71
Jasa Perusahaan	0,43	12,29	2,59 - 3,49	2,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,66	-1,77	2,16 - 2,92	6,15
Jasa Pendidikan	5,02	6,04	5,12 - 5,11	2,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,51	7,12	8,88 - 9,28	10,06
Jasa lainnya	1,18	13,61	5,27 - 5,37	2,57

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Sedangkan pada sisi Pengeluaran, diperkirakan konsumsi rumah tangga akan naik seiring naiknya konsumsi LNPRT terkait adanya kontestasi pilkada, terkendalinya harga barang dan inflasi. Sementara itu dari konsumsi pemerintah yang diproyeksikan naik pertumbuhannya sehubungan dengan besarnya penerimaan pendapatan dan belanja daerah yang diikuti pula dengan meningkatnya serapan anggaran baik dari APBN maupun APBD. Pembentukan

Modal Tetap Bruto diperkirakan akan tumbuh positif 5,30 persen di tahun 2024 melalui peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan, adanya tingkat keyakinan yang tinggi pasca pemilu, pembangunan infrastruktur terus berlanjut dan multi dampak dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Tabel 2.4
Realisasi tahun 2021 – 2022 dan Target Pertumbuhan Ekonomi
Kalimantan Barat dari Sisi Pengeluaran tahun 2023 -2024

PDRB Berdasarkan Pengeluaran	Realisasi		Target (%)	
			RPJMD	RPD
	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB	4,78	5,07	5,02 - 5,68	5,82
Konsumsi Rumah Tangga	1,66	3,61	2,10 - 2,42	5,08
Konsumsi LNPRT	0,16	4,26	-0,03 - 0,02	7,85
Konsumsi Pemerintah	0,06	-6,39	4,31 - 5,09	5,16
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,71	3,06	2,63 - 3,03	5,3
Net Ekspor Barang dan Jasa	38,04	37,24	14,3 -16,27	32,25

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Prospek pertumbuhan ekonomi ditahun 2024 yang optimis memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi kedepannya membawa dampak baik pula terhadap Indeks Pembangunan Manusia, juga berkontribusi positif terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Kemiskinan.

Tabel 2.5. Sasaran Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2024

Indikator Makro Pembangunan	*Realisasi 2022	**Target 2023	***Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,02 - 5,68	5,82
Indeks Pembangunan Manusia	68,63	71,25	70,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,11	5,42 - 3,98	4,32
Angka Kemiskinan (%)	6,81	7,08 - 7,00	5,00 – 5,30

Sumber: * Rilis BPS Prov. Kalbar

** RPJMD Perubahan Prov. Kalbar Tahun 2018-2023

*** RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2024

II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen pembangunan hendak dilakukan sejalan dengan perencanaan pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis pembangunan. Keuangan daerah meliputi komponen penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran terhadap arah kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah akan dilaksanakan secara optimal apabila diikuti dengan pengalokasian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang cenderung terus meningkat. Komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keuangan daerah, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan dan menjadi

satu kesatuan. Sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pembahasan tentang arah kebijakan keuangan daerah, meliputi atas Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendaan, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. Bila dikaitkan dengan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat tahun 2022 dan 2023, dengan melihat tantangan dan prospek perkembangan perekonomian tahun 2024 maka tren pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diprediksi sedikit membaik serta berdampak pada peningkatan potensi sumber penerimaan daerah sehingga mampu memiliki kontribusi positif dalam pembiayaan pembangunan daerah secara optimal.

Pada tahun 2024 ini, proyeksi total Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp6.110.189.379.489,-. Adapun rincian proyeksi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp3.181.634.469.489,-
- b. Pendapatan Transfer = Rp2.926.169.910.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah = Rp 2.385.000.000,-

Sementara itu, total Belanja Daerah yang direncanakan pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.385.005.034.290, - dengan komposisi empat jenis belanja berikut ini:

a. Belanja Operasi	=	Rp3.916.387.966.616,-
b. Belanja Modal	=	Rp1.050.905.664.474,-
c. Belanja tidak terduga	=	Rp 30.000.000.000,-
d. Belanja Transfer	=	Rp1.387.711.403.200,-

Dari sisi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari pos SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp290.815.654.801,-, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16.000.000.000 sebagai penyertaan modal kepada PT.Jamkrida. Sedangkan pengeluaran netto pembiayaan diperkirakan sebesar Rp274.815.654.801,- yang digunakan untuk menutupi defisit atau selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah di tahun 2024.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

III.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Makro Ekonomi tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5,1% hingga 5,7%. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga kedepan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan. Adapun asumsi makro yang disepakati untuk Tahun Anggaran 2024 dalam RAPBN, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,1%-5,7%;
2. Inflasi berada pada kisaran 1,5%-3,5%;
3. Nilai Tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.700-Rp15.200 per USD;
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,49%-6,91%.
5. Harga Minyak Mentah/ICP 75-85 USD per barel
6. Lifting Minyak Mentah 597.000-652.000 barel per hari
7. Lifting gas bumi 999.000-1,054 juta barel setara minyak per hari

Pemerintah pusat menurunkan batas bawah kisaran target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2024. Sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% sampai 5,7% namun diubah menjadi 5,1% sampai 5,7%. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global, serta sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024.

Di sisi APBN dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

Di samping itu, untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi, defisit direncanakan pada kisaran 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Upaya untuk mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan terus dilakukan dengan mengendalikan rasio utang dalam batas yang tetap pruden di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Dengan efektivitas kebijakan fiskal tahun 2024 dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0% hingga 5,7%, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di

pusat maupun di daerah. Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur contributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat untuk seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Kemudian perekonomian wilayah barat dan timur Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024, disparitas kontribusi ekonomi kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah timur Indonesia pada tahun 2023 dan akan ditargetkan akan lebih membaik pada tahun 2024 sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi pertumbuhan wilayah tengah dan timur.

Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca khususnya di Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Selain itu, resiko *administered price* dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi, agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD85 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat resiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik.

Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus sektor riil dan industri terus membuka

peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan memperhatikan peluang dan juga resiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD. Selain itu, Perbaikan kondisi domestic dan global terus berlanjut di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN. Diperkirakan *yield* SBN secara rata-rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya *yield* SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Namun demikian, dalam jangka menengah upaya produksi hulu migas diupayakan terus meningkat. Produksi minyak diupayakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar stadar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan secara teknis maupun non teknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi massif, peningkatan data survei seismic dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Sementara itu secara non teknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan *fiscal terms* dan percepatan *Plan of Development*.

III.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat tahun 2023 telah diproyeksikan didalam Perubahan RPJMD 2018 – 2023 dengan target capaian 5,05 persen hingga 5,68 persen, dan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di proyeksi dalam RPD tahun 2024 – 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 merupakan skala moderat dengan optimisme untuk tercapai dengan peningkatan ekspor, potensi investasi yang tinggi, naiknya daya beli masyarakat

dan peningkatan produksi sektor-sektor unggulan, dan tentunya dengan inflasi terjaga dalam kisaran 1,5 – 3,5 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Barat dari PDRB sisi Pengeluaran masih tergantung pada sektor primer, yang dalam hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan sektor pertambangan dan sektor pertanian di tahun 2022. Pada pertambangan seperti bouksit dan alumina, serta perkebunan sawit cukup mendominasi dalam devisa ekspor, membuat perekonomian Kalimantan Barat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global. Sedangkan pada sisi Pengeluaran, diperkirakan konsumsi rumah tangga akan naik seiring naiknya konsumsi LNPRT terkait adanya kontestasi pilkada, terkendalinya harga barang dan inflasi. Sementara itu dari konsumsi pemerintah yang diproyeksikan naik pertumbuhannya sehubungan dengan besarnya penerimaan pendapatan dan belanja daerah yang diikuti pula dengan meningkatnya serapan anggaran baik dari APBN maupun APBD. Pembentukan Modal Tetap Bruto diperkirakan akan tumbuh positif 5,30 persen di tahun 2024 melalui peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan, adanya tingkat keyakinan yang tinggi pasca pemilu, pembangunan infrastruktur terus berlanjut dan multi dampak dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan memiliki sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber utama penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya terobosan untuk mencari

sumber-sumber alternatif pendapatan daerah, yang sangat limitative sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah prioritas kebijakan pendapatan daerah yaitu menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun *Social Corporate Responsibility (CSR)*, seperti:

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat;
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan swasta atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan perjanjian yang disepakati;
- c. Mendorong peningkatan investasi bagi masyarakat local;
- d. Optimalisasi pengelolaan BUMD.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan restribusi, aparatur yang profesional dan didukung teknologi informasi yang handal.

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN	5.658.492.045.088,00	6.103.471.493.098,21	107,86	6.431.288.413.189,13
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.883.228.824.088,00	3.217.812.121.331,21	111,60	2.507.322.119.826,13
4.01.01	Pajak Daerah	2.427.161.737.441,00	2.671.657.207.218,00	110,07	2.121.967.008.054,30
4.01.02	Retribusi Daerah	9.313.488.000,00	14.328.268.392,00	153,84	32.044.044.936,00
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan	101.025.671.578,00	101.122.147.953,00	100,10	95.733.394.206,00

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Daerah yang Dipisahkan				
4.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	345.727.927.069,00	430.704.497.768,21	124,58	257.577.672.629,83
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.715.855.183.000,00	2.826.541.835.787,00	104,08	3.878.077.918.657,00
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.715.855.183.000,00	2.826.541.835.787,00	104,08	3.878.077.918.657,00
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.408.038.000,00	59.117.535.980,00	99,51	45.888.374.706,00
4.03.01	Pendapatan Hibah	59.408.038.000,00	59.117.535.980,00	99,51	45.888.374.706,00

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2022 Audited

IV.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan PerUndang Undangan. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2024

Kode	Uraian	APBD 2023	RKPD 2024	Pertumbuhan (%)	
4	PENDAPATAN DAERAH	6.011.832.660.332	6.110.189.379.489	98.356.719.157	1,64
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.029.176.056.332	3.181.634.469.489	152.458.413.157	5,03
4.01.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965	2.744.947.300.486	161.460.806.521	6,25
4.01.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000	10.519.386.000	(1.422.084.000)	-11,91
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092	122.587.000.090	2.242.319.998	1,86
4.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	313.403.412.275	303.580.782.913	(9.822.629.362)	-3,13
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.926.169.910.000	2.926.169.910.000	-	0,00
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.926.169.910.000	2.926.169.910.000	-	0,00
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.486.694.000	2.385.000.000	(54.101.694.000)	-95,78
4.03.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	2.385.000.000	(54.101.694.000)	-95,78

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya, serta Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang dialokasikan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4		
5	BELANJA	5.994.652.629.595,00	5.726.863.899.070,96	99,51	5.156.492.768.188,02
5.1	BELANJA OPERASI	3.743.692.395.527,00	3.542.937.437.772,38	95,53	4.227.689.006.581,02
5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.973.211.426,00	1.510.988.315.663,00	94,38	1.414.460.424.489,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.886.144.683.063,00	1.785.369.030.913,88	94,66	1.606.232.257.377,34
5.1.05	Belanja Hibah	248.115.707.956,00	238.155.740.850,00	95,99	1.199.201.799.614,68
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.458.793.082,00	8.424.350.345,00	99,59	5.794.525.400,00
5.2	BELANJA MODAL	1.045.718.637.804,00	1.003.966.698.357,78	96,01	927.107.860.128,00
5.2.01	Belanja Tanah	2.369.416.004,00	194.000.000,00	8,19	2.215.067.174,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	234.208.402.243,00	224.930.925.535,00	96,04	188.911.136.885
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	430.016.383.756,00	413.421.870.792,50	96,14	459.483.907.405,00

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4		
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	353.341.760.291,00	340.270.448.258,28	96,30	255.562.950.630,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.116.318.419,00	20.890.386.056,00	98,93	20.934.798.034,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	4.666.357.091,00	4.259.067.716,00	91,27	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	9.600.504.054,00	465.740.000,00	4,85	1.695.901.477,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	9.600.504.054,00	465.740.000,00	4,85	1.695.901.477,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.195.641.092.210,00	1.179.494.022.940,80	98,65	1.145.654.228.413,86
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.148.161.092.210,00	1.140.663.296.568,80	99,35	1.073.859.228.413,86
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	47.480.000.000,00	38.830.726.372,00	81,78	72.795.000.000,00

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2022 Audited

V.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB).
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 baik untuk KPU, Bawaslu maupun Pengamanan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga pendidik dan medis maupun peningkatan kapasitas.
6. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja.
7. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan yang membuka akses distribusi logistik serta membuka keterisolasiannya suatu daerah, menghubungkan konektivitas antara daerah sentra produksi dan daerah sentra perdagangan.

8. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
9. Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk mengganggu pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.
10. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanganan penganggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

Tabel 5.2
Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2023 s/d 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	RKPD 2024	Pertumbuhan (%)	
5	BELANJA	6.280.973.661.504	6.385.005.034.290	104.031.372.786	1,66
5.1	BELANJA OPERASI	3.595.286.646.521	3.916.387.966.616	321.101.320.095	8,93
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.409.075.584	1.819.958.723.199	130.549.647.615	7,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.847.643.832	1.646.195.242.758	(18.652.401.074)	(1,12)
5.1.05	Belanja Hibah	240.372.000.166	450.216.000.659	209.844.000.493	87,30
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939	18.000.000	(639.926.939)	(97,26)
5.2	BELANJA MODAL	1.375.288.294.883	1.050.905.664.474	(324.382.630.409)	(23,59)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000		(34.189.000)	(100,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.446.383.643	207.969.862.424	(21.476.521.219)	(9,36)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.693.680.062	384.691.777.142	(25.001.902.920)	(6,10)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	714.211.802.909	437.483.766.412	(276.728.036.497)	(38,75)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.881.619	18.491.012.419	(341.869.200)	(1,82)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.069.357.650	2.269.246.077	(800.111.573)	(26,07)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	1.280.398.720.100	1.387.711.403.200	107.312.683.100	8,38
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100	1.309.861.403.200	91.067.683.100	7,47
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	61.605.000.000	77.850.000.000	16.245.000.000	26,37
	JUMLAH	6.280.973.661.504	6.385.005.034.290	104.031.372.786	1,66
	Total Surplus / (Defisit)	(269.141.001.172)	(274.815.654.801)	(5.674.653.629)	2,11

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2024, utamanya pada penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp150.000.000000. yang diperoleh dari proyeksi SILPA pada tahun 2023 meskipun SILPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Sementara itu perkiraan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang diperkirakan.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	386.160.584.507,00	386.160.584.507,00	100,00	313.019.167.918,62
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	386.160.584.507,00	386.160.584.507,00	100,00	313.019.167.918,62
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	55.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	55.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	336.160.584.507,00	336.160.504.507,87	100,00	258.019.167.918,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	712.768.098.535,12	100,00	386.160.584.507,87

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2022 Audited

Tabel 6.2
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 - 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	RKPD 2024	Pertumbuhan (%)	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172	290.815.654.801	(28.325.346.371)	(8,88)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172	290.815.654.801	(28.325.346.371)	(8,88)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172	290.815.654.801	(28.325.346.371)	(8,88)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	16.000.000.000	(34.000.000.000)	(68,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	16.000.000.000	(34.000.000.000)	(68,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	16.000.000.000	(34.000.000.000)	(68,00)

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Guna mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu terus dikembangkan. Program dan kegiatan yang searah mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai dengan berbagai skema dengan memperhatikan kapasitas fiskal. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi

alternatif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sangat dimungkinkan karena keterbatasan anggaran pembangunan daerah.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari penyelenggaraan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Dokumen RPD ini merupakan periode kelima dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025, tahap ke-5 ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kalimantan Barat yang ditandai oleh kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisien dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025, adalah **“Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025, dirumuskan 9 (sembilan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran;
2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance);
4. Mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan infrastruktur yang memadai;
6. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkeselimbangan;
7. Mewujudkan perekonomian yang maju;
8. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif;
9. Mewujudkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab

Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pendekatan money follow program yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Tujuan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kalimantan Barat Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing	Meningkatnya SDM Yang Berdaya Saing, Berfokus pada Keterjangkauan Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan serta Standar Hidup Layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Akses, Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Kesehatan 2. Menciptakan Kestabilan Harga untuk Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat
Mewujudkan Perekonomian Yang tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Infrastruktur Produksi 2. Penguatan dan Pengawasan Investasi 3. Menciptakan Akses Pasar 4. Pendampingan Pelaku Usaha 5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lapangan Usaha Unggulan

Reformasi Birokrasi Yang Berprinsip Good Governance Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik	Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Dinamis, Adaptif dan Berorientasi pada Pelayanan
---	---	---

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis, dimana ujungnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mereformasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melalui akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, kapasitas ASN, transformasi digital pada layanan publik. Pemerintah Kalimantan Barat berkomitmen kedepan akan lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintah dengan mempelajari iklim dimana perubahan amat cepat dan ketidakpastian tinggi, pemerintah yang efektif juga mensyaratkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, kemampuan yang membuat institusi pemerintah dapat terus tetap relevan ketika kondisi berubah.

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Sasaran dari Tujuan ketiga yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan kedepan fokus pada 3 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

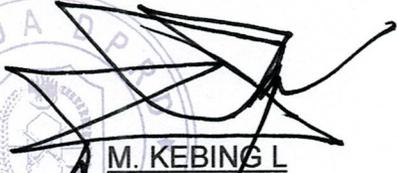
VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, 26 September 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



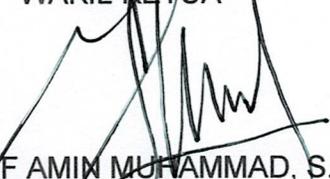
M. KEBING L
KETUA



dr. HARISSON, M.Kes



Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
WAKIL KETUA



H. SYARIF AMIN MUHAMMAD, S.Ak
WAKIL KETUA



YULIANA, S.M.
WAKIL KETUA